



LAPORAN WEBINAR BKSAP DPR RI
TEMA : ” “PELUANG DAN TANTANGAN DIPLOMASI PARLEMEN DALAM
MENCAPAI KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA
DI TENGAH TANTANGAN GLOBAL ”
KAMIS, 14 JANUARI 2021

I. PENDAHULUAN

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyelenggarakan Webinar dengan tema : ”Peluang dan Tantangan Diplomasi Parlemen dalam Mencapai Kepentingan Nasional Indonesia di Tengah Tantangan Global”. Dalam webinar tersebut disampaikan peran BKSAP sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi Diplomasi Parlemen. Dalam pelaksanaan tugasnya BKSAP melaksanakan *second track diplomacy* dengan menghadiri berbagai sidang regional/internasional maupun melaksanakan pertemuan bilateral dengan negara-negara sahabat untuk membahas berbagai isu internasional untuk kepentingan nasional Indonesia.

Webinar BKSAP DPR RI dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, pukul 18.30 WIB di Gedung Nusantara III lantai 6. Acara dibuka oleh moderator Tenaga Ahli BKSAP dengan 2 (dua) narasumber yaitu :

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| a. Dr. H. Mardani, Ali Sera, M. Eng | Wakil Ketua BKSAP | A-422/F.PKS |
| b. Hj. Sakinah Aljufri, S.Ag | Anggota BKSAP | A-456/F.PKS |

Webinar ini dihadiri kurang lebih 103 peserta yang terdiri dari Anggota DPR RI, praktisi, dosen, peneliti, mahasiswa, pelajar, dosen, pekerja, wartawan dan organisasi masyarakat.

II. TUJUAN

Webinar dalam bentuk diskusi panel melalui aplikasi zoom bertujuan :

1. Untuk mengeksplorasi peran apa yang dimiliki Parlemen dalam mengawasi pengeluaran publik selama dan setelah pandemi Covid 19, dengan

memanfaatkan pengalaman Anggota DPR RI yang telah beradaptasi dan melaksanakan pengawasan pada saat kritis ini.

2. Memperkuat jaringan-jaringan yang ada dan menciptakan hubungan-hubungan baru antara Parlemen di dunia seputar isu pengawasan keuangan sebagai respon terhadap pandemi ini.

III. ISI LAPORAN

A. PAPARAN

1. Dr.H. Mardani Ali Sera, M. Eng, Dapil DKI Jakarta I

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng, menyampaikan paparan yang diawali dengan pernyataan Di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, tantangan yang dihadapi bangsa-bangsa seluruh dunia semakin kompleks, bukan hanya berkaitan dengan masalah kesehatan, namun juga imbas yang ditimbulkan oleh COVID-19 di berbagai sektor penting lainnya seperti ekonomi, perdagangan, sosial, dan lain-lain. Peluang Kondisi saat ini yaitu meningkatnya keterkaitan antar negara dan bangsa di seluruh dunia dan Jalinan kerja sama di berbagai bidang strategis (perindustrian, perdagangan, investasi dan ekonomi, Pendidikan, dll). Sedangkan tantangan yaitu menguatnya tren proteksionisme dan unilateralisme, enggan mengutamakan prinsip solidaritas dan memilih pendekatan sepihak dalam penyelesaian masalah global.

Untuk melaksanakan diplomasi parlemen tersebut DPR RI dilengkapi oleh Alat Kelengkapan Dewan yang bernama Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), yang diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR RI dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral termasuk partisipasi DPR dalam organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain.

Pada praktiknya, diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI juga bersinergi dengan diplomasi yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian Luar Negeri, sebagai *focal point* pelaksanaan diplomasi eksekutif. DPR RI juga mendukung penuh

prioritas politik luar negeri RI yang di masa pandemi ini melakukan *refocusing* yakni dengan berfokus pada 3 (tiga) hal yaitu: memperkuat perlindungan WNI, berkoordinasi mengelola pandemi (kesehatan, sosial, ekonomi), dan berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian dunia. DPR RI dan Kemlu juga secara aktif terus melakukan kolaborasi dan sinergi dalam pembahasan terkait berbagai masalah global, salah satunya yaitu mengenai upaya merespon pandemi COVID-19, yang saat ini difokuskan melalui upaya diplomasi vaksin dan pemulihan ekonomi.

Di samping itu, DPR RI juga secara aktif terlibat dalam berbagai forum parlemen yang diadakan secara virtual di masa pandemi yakni antara lain *Asian Parliamentary Assembly (APA)*, *ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA)*, *Inter Parliamentary Union (IPU)*, dan lain-lain dengan menekankan pada upaya peningkatan kerjasama ekonomi antarnegara dalam rangka pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi, mendorong tersedianya akses yang setara bagi setiap negara terhadap vaksin, alat kesehatan dan obat-obatan, mendorong penguatan kerja Parlemen khususnya dalam bidang pengawasan untuk memantau bagaimana pemerintah merespon pandemi dan dampaknya, serta berbagi praktek terbaik mengenai bagaimana parlemen di masing-masing negara bisa berkontribusi secara maksimal di era pandemi.

2. Hj. Sakinah Aljufri, S.Ag, Dapil Sulawesi Tengah

Keberadaan BKSAP DPR menjadi peluang bagi Pemerintah. Banyak persoalan di dunia yang perlu diselesaikan dengan cara pendekatan *Parliament to Parliament* dengan meningkatkan penciptaan perdamaian dunia. BKSAP berperan aktif dalam berbagai forum internasional dan regional serta memberikan capaian-capaian (*milestone*) yang signifikan bagi Politik Luar Negeri, misalnya terkait persolan Palestina. DPR RI berhasil menggalang dukungan melalui *joint statement* yang didukung 200 anggota parlemen dari berbagai negara guna menentang dan menolak keras aneksasi Israel terhadap wilayah Palestina. Selain itu, melalui dibentuknya GKSB DPR RI-Parlemen Palestina, kami berharap dapat mendorong terwujudnya perdamaian komprehensif, adil, dan abadi di Palestina melalui berbagai upaya diplomasi yang dilakukan.

Delegasi BKSAP DPR RI telah berhasil untuk meminta penjelasan para petinggi parlemen Myanmar pada Sidang Umum tahun 2018 dan Sidang *International Humanitarian Law (IHL)* pada pertemuan IPU ke-139 di Jenewa mengenai perkembangan yang telah dicapai Myanmar untuk menciptakan perdamaian dan menghapus segala jenis penindasan

terhadap etnis Rohingya. Terkait Uyghur, delegasi DPR RI mengusulkan agar PUIC mengirimkan delegasi untuk secara langsung meninjau kondisi Komunitas Muslim Uyghur di Xinjiang guna mendapatkan informasi dan mengumpulkan fakta-fakta dari lapangan.

Dalam masa pandemi saat ini, yang paling terpuruk yaitu sektor pariwisata. BKSAP dan Komisi X DPR RI saling bekerjasama mempromosikan pariwisata saat ini, perlu penerapan protokol kesehatan. Terkait vaksin harus diperjelas melalui sosialisasi ke masyarakat bahwa dinyatakan halal dan aman. Presiden RI sudah divaksin, jadi diharapkan masyarakat juga dapat divaksin dan tidak mudah terpengaruh berita *hoax*.

BKSAP juga mendorong segera terwujudnya *Travel Bubble* atau *Travel Corridor* di lingkup ASEAN, salah satunya melalui resolusi yang diusung oleh DPR RI dalam Sidang Umum ke-41 ASEAN *Inter Parliamentary Assembly* (AIPA) bulan Agustus tahun ini yang berfokus pada agenda pemulihan sektor pariwisata yang merupakan salah satu sektor paling terdampak COVID-19. Melalui diplomasi parlemen, BKSAP dapat berperan dalam mendukung pemulihan pariwisata nasional dalam rangka *Nation Branding*, dengan mempromosikan potensi pariwisata yang dimiliki oleh kota-kota di Indonesia dalam tiap pelaksanaan diplomasi baik secara bilateral, regional maupun multilateral.



Gb. 1 : Narasumber Webinar Dr. Mardani Ali Sera dan Ibu Hj. Sakinah Al Jufri beserta Moderator

B. TANYA JAWAB

a. Tanya :

Seberapa besar pengaruh *secondtrack diplomasi* dalam mempengaruhi *firsttrack diplomasi* . Karena jika semua keputusan politik diambil oleh *firsttrack diplomasi* yaitu Pemerintah (Kemenlu) dan *secondtrack diplomasi* hanya memberikan saran/masukan hal ini tidak efektif ?

Jawab :

Pandangannya dalam perspektif negara, bukan Pemerintahan. Untuk Palestina, Pemerintah sepakat untuk komitmen memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Disarankan adanya tambahan anggaran dan nambah organisasi di Kemenlu yaitu desk khusus untuk kemerdekaan Palestina. Terhadap vaksin, negara Kanada sudah membeli vaksin duluan. Perlu diplomasi Parlemen dalam menangani masalah Sawit Indonesia di Eropa di blokade dan kasus Papua.

b. Tanya :

Sampai kapan pelanggaran HAM dapat dihentikan ?

Jawab :

Ada 3 yang efektif terkait menghentikan pelanggaran HAM yaitu 1) mempunyai data fakta dan bukti yang kuat; 2) harus punya Ahli Hukum Internasional yang tangguh; 3) punya pendekatan kekuatan politik, ekonomi dan persenjataan.

c. Tanya :

Bagaimana BKSAP bisa mengajukan nota protes terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Cina di Laut Cina Selatan ? Dan BKSAP dapat berperan menyelesaikan kasus HAM ?

Jawab :

Peran Pertahanan RI perlu ditingkatkan, karena terlihat adanya sistem pembiaran. Kita pernah diprotes terkait penanganan kasus Papua dan kebakaran hutan.

Mengenai kasus Habib, DPR RI mendorong Pemerintah untuk transparansi dan adanya keadilan.

Selain sesi tanya jawab, narasumber juga mendorong partisipasi peserta untuk menjawab beberapa pertanyaan dari narasumber untuk mengasah kemampuan peserta dalam webinar tersebut :

d. Tanya :

Tahun 1982, Indonesia mendapatkan hasil diplomasi yang sangat luar biasa, melalui forum UNCLOS. Siapakah nama tokoh Indonesia yang berjuang saat ini.

Jawab :

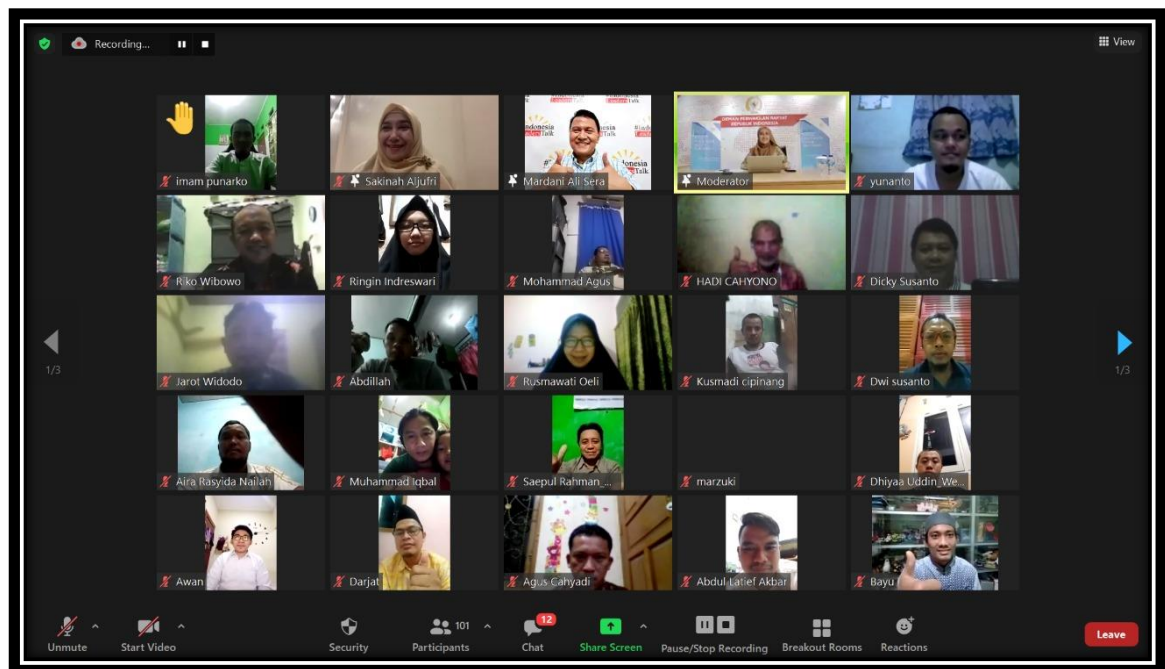
Ir. Juanda

e. Tanya :

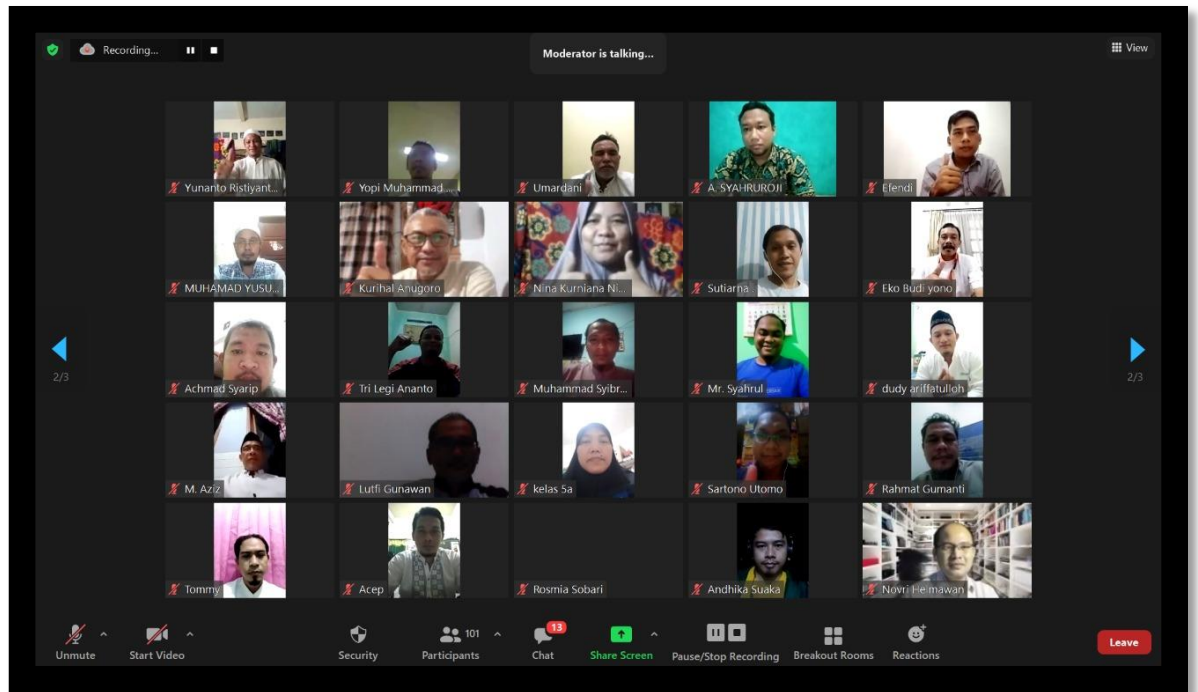
Sebutkan 3 hal Sinergi Diplomasi Parlemen dan Eksekutif ?

Jawab :

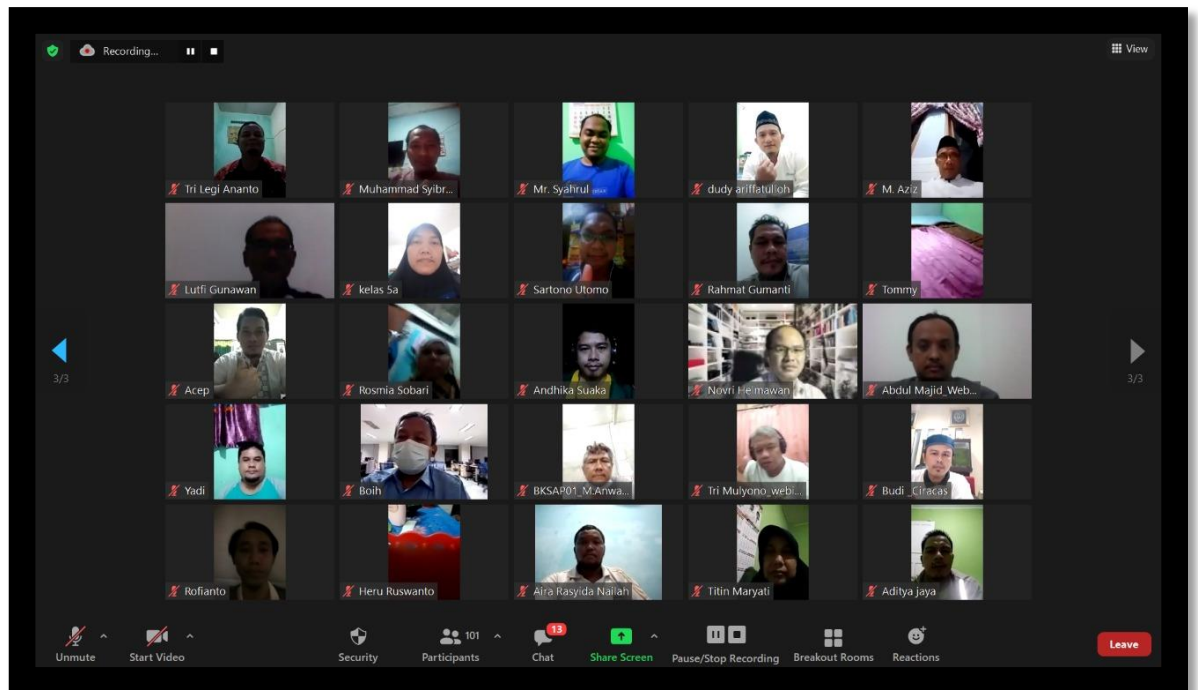
- Memperkuat perlindungan WNI
- Berkoordinasi mengelola pandemi
- Berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian dunia



Gb. 2 : Sesi tanya jawab peserta Webinar



Gb. 3 : Sesi tanya jawab peserta Webinar



Gb.4 : Sesi tanya jawab peserta webinar

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. BKSAP merupakan penjuror diplomasi parlemen yang dijalankan DPR RI. Diplomasi parlemen merupakan bagian dari diplomasi yang melibatkan pemangku kepentingan secara luas dikenal dengan *multitrack diplomacy* atau diplomasi multijalur, dan hal ini belum banyak diketahui secara umum, sehingga perlu terus diadakan acara semacam ini untuk diseminasi informasi yang lebih luas kepada masyarakat.
2. Kerjasama internasional dalam penanganan pandemi mutlak diperlukan, sehingga BKSAP akan terus menyuarakan hal tersebut di berbagai forum.

B. SARAN

1. Melihat antusiasme peserta Webinar dalam mengikuti acara ini, BKSAP diharapkan terus melakukan sosialisasi mengenai diplomasi parlemen untuk meningkatkan profil BKSAP dan menyebarluaskan peran aktif BKSAP dalam menjalankan diplomasi parlemen.
2. Tema Webinar BKSAP dapat bervariasi dengan melihat kondisi global yang up to date seperti isu Myanmar, SDGs, lingkungan dan isu-isu HAM.

V. PENUTUP

A. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi dengan link liputan media sebagai berikut:

- <https://bit.ly/WEBINARGKSB-14JAN>
- <https://www.instagram.com/p/CKDW8GWnK2G/?igshid=1oi12rn50ynpy>

B. KATA PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok laporan pelaksanaan Webinar BKSAP pada tanggal 14 Januari 2021. Webinar ditutup dengan pemberian hadiah kepada penanya terbaik dan semua peserta mendapatkan e-sertifikat. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Narasumber untuk melaksanakan sosialisasi diplomasi parlemen ke masyarakat. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Webinar ditutup pada pukul 20.00 WIB

Jakarta, Januari 2021
Wakil Ketua BKSAP DPR RI

ttd

Dr.H. Mardani Ali Sera, M.Eng
A-422